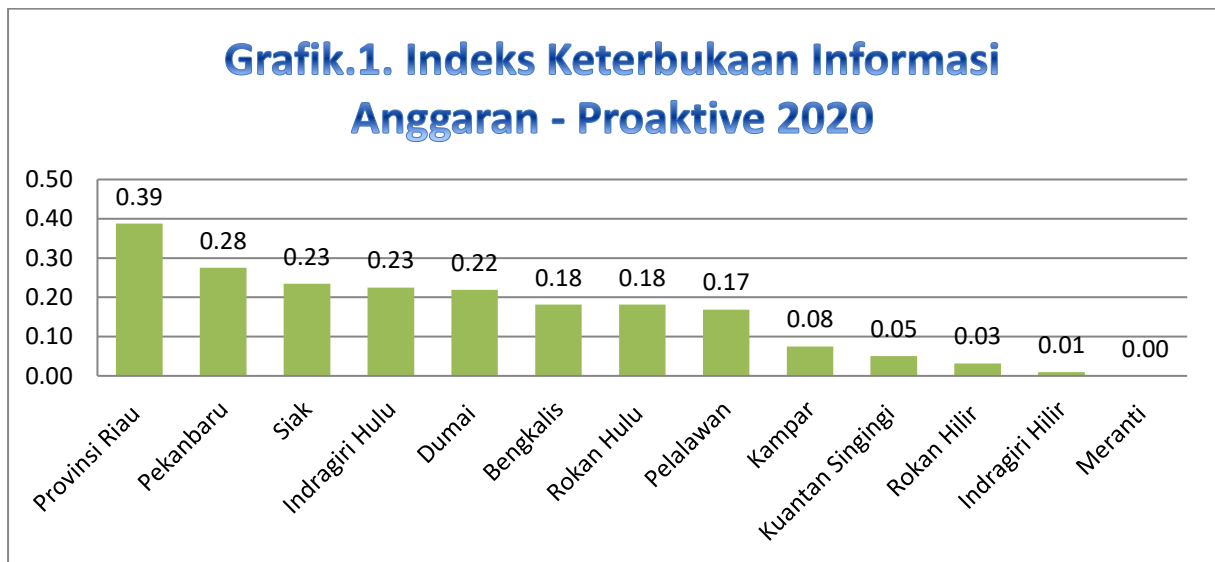


JenisBerkas	: Pers Rilis	No. Arsip	: PR.Januari/01
Judul	: Kinerja Keterbukaan Informasi Anggaran Rendah	Tanggal	: 14 Januari 2021
Sub Judul	: Pemda Se Riau Tidak Patuhi PP 45 Tahun 2018	Tahun	: 2021
		Penulis	: *FITRA RIAU*

**Kinerja Keterbukaan Informasi Anggaran Renda  
 Pemda Se Riau Tidak Patuhi PP 45 Tahun 2018**

Fitra Riau melakukan riset dalam memotret kinerja keterbukaan informasi anggaran pemerintah daerah meliputi Provinsi dan 12 kabupaten/kota di Riau. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan indentifikasi atau penelusuran website resmi badan publik pemerintah daerah Provinsi dan 12 Kabupaten/Kota pada Priode 7 – 20 Desember 2020. Meliputi Website utama pemerintah daerah dan website yang dimiliki OPD (terutama Bappeda, Kominfo, DPKAD/BKD).



Sumber:Fitra Riau 2021

Perolehan nilai rata-rata kinerja publikasi proaktiv informasi anggaran 2020 berada dalam kategori rendah, yaitu 0,16. Perolehan nilai indeks tertinggi adalah pemerintah Provinsi Riau dengan perolehan skor hanya 0,39, (masih termasuk kategori rendah). Sedangkan empat kabupaten/kota (Pekanbaru, Siak, Indragiri Hulu, dan Dumai) dengan perolehan skor indeks antara 0,22 – 0,28.

Sementara kabupaten lainnya skor indek yang diperoleh dibawah 0,20 hingga tidak memperoleh nilai sama sekali. Lima daerah Kabupaten Kampar, Kuantan singingi, Rokan Hilir merupakan daerah dengan nilai yang sangat rendah. Hampir seluruh informasi yang di indentifikasi ditemukan di website pemerintah daerah ini. Kabupaten Kampar hanya ditemukan informasi/dokumen perencanaan yang tidak lengkap. Kabupaten Meranti, tidak satu pun dari 21 dokumen dan informasi yang diidentifikasi ditemukan di website pemerintahnya.



Sumber: Fitra Riau 2018 dan 2020

Dilihat perbandingan nilai Indeks 2018 - 2020 adanya kemunduran publikasi informasi anggaran proaktif semakin buruk, jika dilihat dari data indeks Provinsi Riau mengalami peningkatan, ditahun 2018 0,23 persen naik di tahun 2020 menjadi 0,39 persen. dan yang mengalami penurunan setiap kabupaten kota yang menempati posisi 3 daerah paling rendah ialah kabupaten kepulauan meranti, dimana ditahun 2018 sebesar 0,20 persen turun ditahun 2020 menjadi 0 persen, selanjutnya inhil tahun 2018 sebesar 0,17 persen turun menjadi 0,01 persen, rohil 2018 sebesar 0,32 persen 2020 turun menjadi 0,03 persen.

disamping itu Fitra Riau juga menemukan Publikasi informasi anggaran proaktif semakin buruk, Dokumen perencanaan pembangunan dipublikasi dan dokumen anggaran minim publikasi, Pemerintah daerah tidak patuh terhadap PP 45 tahun 2018 selanjutnya Informasi anggaran penanganan Covid19 tertutup.

Untuk itu Fitra Riau memberikan rekomendasi :

- Kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) harus memastikan peningkatan kinerja keterbukaan informasi publik menjadi agenda kinerja pembangunan sebagai tujuan dari pencapaian reformasi birokrasi dan pencapaian *good governance*. Kinerja keterbukaan informasi harus menjadi agenda dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- Mendorong peningkatan kinerja PPID di daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam pendokumentasian, pengelolaan dan pelayanan informasi secara proaktif melalui media informasi resmi pemerintah. Meliputi seluruh dokumen dan informasi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah mulai dari dokumen perencanaan, dokumen perencanaan anggaran, dokumen anggaran dan pertanggungjawaban.